KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASANA PERMUKIMAN SUMATERA II
SATKER PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
Jalan Suluh No. 99 A Kel. Sidorejo Hilir Medan – 20222 Telepon/Faks (061) 80033120

Nomor : KU.03.09/Bp2/117 Medan, 15 Oktober 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Trwulan III TA 2026 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Yth. Kepala KPPN Medan I
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-952/KPPN.0201/2026 tanggal 06 Oktober 2026 perihal *Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementeraian/Lembaga Triwulan III Tahun 2026*.

Bersama ini dengan hormat kami menyampaikan Laporan Keuangan Tinggkat UAKPA Triwulan III TA 2026 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II kode Satker ***691381***.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera II

Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.
NIP. 198105122010121001

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II (691381)

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN - III TA. 2026

Jalan Suluh No. 99A, Medan
Provinsi Sumatera Utara
Telp. (061) 80033120 Fax (061) 80033120

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 15 Oktober 2026

Kepala
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera II,

Ir. Wahyu Adi Satriawan, ST., MT.
NIP. 19810512201012001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	Ii
Daftar Tabel dan Lampiran	Iii
Pernyataan Tanggung Jawab	V
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

			Hal
Tabel 1	:	Penggolongan Kualitas Piutang	12
Tabel 2	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	14
Tabel 3	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Terwujud	15
Tabel 4	:	Rincian Pendapatan Negara Bukan	17
Tabel 5	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	18
Tabel 6	:	Perbandingan Realisasi Belanja	18
Tabel 7	:	Perbandingan Belanja Barang	19
Tabel 8	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	19
Tabel 9	:	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin	20
Tabel 10		Rincian Aset Lancar	21
Tabel 11		Rincian Persediaan	23
Tabel 12	:	Rincian Aset Tetap	24
Tabel 13	:	Mutasi Peralatan dan Mesin	25
Tabel 14	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	26
Tabel 15	:	Rincian Aset Lainnya	27
Tabel 16		Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	28
Tabel 17	:	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	31
Tabel 18	:	Rincian Beban Pegawai	31
Tabel 19	:	Rincian Beban Persediaan	32
Tabel 20	:	Rincian Beban Barang dan Jasa	33
Tabel 21	:	Rincian Beban Pemeliharaan	33
Tabel 22	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas	34
Tabel 23	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
Tabel 24	:	Rincian Kegiatan Non Operasional	35
Tabel 25	:	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	36
Tabel 26	:	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	37
Tabel 27	:	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	37

LAMPIRAN DATA–DATA PENDUKUNG

Lampiran 1	:	Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja
Lampiran 2	:	Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
Lampiran 3	:	Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja
Lampiran 4	:	Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja
Lampiran 5	:	Neraca Percobaan Berbasis Akrual (Saldo Awal)
Lampiran 6		Neraca Percobaan Berbasis Akrual Periode
Lampiran 7	:	Neraca Percobaan Berbasis Kas Periode
Lampiran 8	:	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Periode

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Penutupan Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 15 Oktober 2026

Kepala
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera II,

Ir. Wahyu Adi Satriawan, ST., MT.
NIP. 19810512201012001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai pada 30 September 2026 adalah sebesar Rp0 berupa pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September 2026 adalah sebesar Rp 656.596.099,- atau mencapai 49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.334.246.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2026.

Nilai Aset per 30 September 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.202.428.368,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 15.410.100,-; Aset Tetap (Neto) sebesar Rp. 7.024.888.221,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,-; dan Aset tetap Lainnya (Neto) sebesar Rp. 162.130.147,-. Nilai Kewajiban per 30 September 2026 tersaji sebesar Rp. 15.000.000,-, sementara itu nilai Ekuitas per 30 September 2026 disajikan sebesar Rp. 7.187.428.368

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 7.202.428.368,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2026 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan oprasional adalah sebesar Rp. 802.621.343,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (802.621.343,-). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (802.621.343,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas Awal yaitu pada tanggal 30 September 2026 sebesar Rp. 7.335.773.156,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (802.621.343,-) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (2.319.544,-) dan Transaksi Antar Entitas sebsesar Rp. 656.596.099,- dan Kenaikan dan Penuruan Ekuitas sebesar Rp. (148.344.788,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2026 adalah senilai Rp 7.187.428.368,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengung-kapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BEARAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPPTEMBER 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	**B.1**				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	#DIV/0!	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	**-**	**#DIV/0!**	**-**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-		-
Belanja Barang	B.2.2	1.284.398.000	607.041.099	47,26	383.872.591
Belanja Modal	B.2.3	49.848.000	49.555.000	99,41	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-		-
JUMLAH BELANJA		**1.334.246.000**	**656.596.099**	**49,21**	**383.872.591**

II. NERACA

SATUAN KERJA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
NERACA
PERIODE SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	15.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	410.000	1.746.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.9A	-	-
Jumlah Aset Lancar		**15.410.000**	**1.746.000**
			-
PIUTANG JANGKA PANJANG			-
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	3.460.550.000	3.460.550.000
Peralatan dan Mesin	C.14	2.761.900.796	2.804.189.486
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.14A	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	4.478.333.149	4.478.333.149
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister	C.16A	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	27.744.000	27.744.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.19	(3.703.639.724)	(3.628.841.435)
Jumlah Aset Tetap		**7.024.888.221**	**7.141.975.200**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	220.000.000	220.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	726.422.582	634.578.892
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(784.292.435)	(662.526.936)
Jumlah Aset Lainnya		**162.130.147**	**192.051.956**
JUMLAH ASET		**7.202.428.368**	**7.335.773.156**
KEWAJIBAN		-	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	
Uang Muka dari KPPN	C.24	15.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**15.000.000**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**15.000.000**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	7.187.428.368	7.335.773.156
JUMLAH EKUITAS		7.187.428.368	7.335.773.156
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**7.202.428.368**	**7.335.773.156**

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	53.301.100	6.254.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	406.467.373	234.319.946
Beban Pemeliharaan	D.5	126.674.023	143.229.645
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21.934.603	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	194.244.244	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		802.621.343	383.803.591
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(802.621.343)	(383.803.591)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI SEBELUM POS LUAR BIASA		(802.621.343)	(383.803.591)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(802.621.343)**	**(383.803.591)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PERIODE 30 SEPTEMBER 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	7.335.773.156	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(802.621.343)	(383.803.591)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2.319.544)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		**656.596.099**	**383.872.591**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(148.344.788)**	**69.000**
EKUITAS AKHIR		**7.187.428.368**	**69.000**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Balai Penyediaan Perumahan dan Kawaasan Permukiman Sumatera II.

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 13 huruf g mengamanatkan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR). Dalam rangka menindaklanjuti upaya tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan PenyediaanRumah Khusus mengatur penyelenggaraan kebijakan Bantuan PembangunanPerumahan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana terhadap bantuan tersebut dapat diberikan layanan informasi dan bantuan teknis berupa Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman. Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dimaksudkan sebagai upayameningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dan memberikan layanan informasi serta bantuan teknis untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni, Untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 2 ayat (12) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta dalam rangka penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, efektif, dan akuntabel,perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah Provinsi Sumatera Utara Medan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan Kawasan Permukiman;

g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan Permukiman pasca bencana dan kerusakan;

h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;

j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;

k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum Perumahan dan Kawasan Permukiman

l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitai pembiayaan Perumahan

m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima asset;

n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, system pengendalian internal, sistem manajemen resiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyuapan;

o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum, dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan..

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

  Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut :
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluar-kannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterimandalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan saebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpe-doman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Periode Tahun 2026 Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II merupakan salah satu entitas yang terdampak oleh perubahan struktur kelembagaan atau kebijakan pemerintah dan menjadi kementerian baru, selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdsasrkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Rincian Revisi Anggaran pada Tahun Anggaran 2026

U r a i a n	Tahun Anggaran 2026	
	Anggaran Semula	Anggaran Menjadi
Pendapatan :		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja :		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.234.839.000	1.284.398.000
Belanja Modal	69.234.000	49.848.000
Belanja Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**1.304.073.000**	**1.334.246.000**

Realisasi Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera II terdiri darii Penerimaan Pajak sebesar Rp 0,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- pendapatan ini dari tahun sebelumnya Tidak ada Realisasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 30 SEPTEMBER 2026		
	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)Thd Pagu
Penerimaan Pajak	-	-	(N/A)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	(N/A)
Jumlah	**-**	**-**	**(N/A)**

Realisasi Belanja Negara Rp.656.596.099,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II pada 30 September 2026 adalah sebesar Rp. 656.596.099,- atau 49,21% dari anggaran belanja setelah di revisi sebesar Rp.1.284.398.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 September 2026 tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 September 2026 dan 2025

URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI	%	ANGGARAN 2025	REALISASI	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	-	0	0	(N/A)
Belanja Barang	1.284.398.000	607.041.099	47,26	965.241.000	383.872.591	33,07
Belanja Modal	49.848.000	49.555.000	99,41	0	0	(N/A)
Bantuan Sosial	0	0	-	0	0	(N/A)
Total Belanja Kotor	**1.334.246.000**	**656.596.099**	**49,21**	**965.241.000**	**383.872.591**	**33,07**
Pengembalian Belanja		-	-		-	**(N/A)**
Belanja Netto	**1.334.246.000**	**656.596.099**	**49,21**	**965.241.000**	**383.872.591**	**33,07**

Dibandingkan dengan TA 2025, Realisasi belanja per 30 September 2026 mengalami kenaikan 33,07%, dibandingkan TA. 2025,

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III TA 2026 sebesar Rp. 0,00% hal ini disebabkan antara lain :

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 SEPTEMBER 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	(N/A)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	(N/A)
Belanja Honorarium	-	-	(N/A)
Jumlah Belanja Kotor	-	-	(N/A)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	(N/A)
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**(N/A)**

Belanja Pegawai Rp.0,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II pada 30 September 2026 meliputi Sub Kelompok Belanja 5111 (Belanja Pegawai), dan Sub Kelompok Belanja 5124 (Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan).

Realisasi Belanja Pegawai 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- dikarenakan semua Belanja Pegawai berpusat di Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.

Realisasi Belanja Barang Rp.607.041.099,-

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi Belanja Barang untuk Periode 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 607.041.099,- dan Rp. 383.872.591,- pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Tabel 7

Perbandingan Belanja Barang 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 SEPTEMBER 2026	REALISASI 2025	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	265.667.175	183.910.925	44,45
Belanja Barang Non Operasional	6.263.684	7.643.500	(18,05)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51.965.100	6.323.000	721,8
Belanja Jasa	134.536.514	42.765.521	214,59
Belanja Pemeliharaan	126.674.023	143.229.645	(11,56)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.934.603	-	N/A
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	N/A
Jumlah Belanja Kotor	**607.041.099**	**383.872.591**	58,14
Pengembalian Belanja	-	-	N/A
Jumlah Belanja Bersih	**607.041.099**	**383.872.591**	**58,14**

Belanja Modal

Rp. 49.555.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.555.000,- dan Rp. 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaan lebih dari satu pada periode akuntansi

Realisasi Belanja Modal Tahun 2026 sebesar 100% dibandingkan TA. 2025 disebabkan oleh Tahun 2025 tidak ada belanja modal peralatan dan mesin

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2026	2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	N/A
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.555.000	0	N/A
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	N/A
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	N/A
Belanja Penambahan Nilai Gedung&Bangunan	0	0	N/A
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	N/A
Belanja Modal Lainnya	0	0	N/A
Belanja Modal BLU	0	0	N/A
Jumlah Belanja Kotor	49.555.000	0	N/A
Pengembalian Belanja Modal	0	0	N/A
Jumlah Belanja Bersih	**49.555.000**	**0**	**N/A**

Belanja Modal Tanah Rp. 0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 September 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandikan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 karena tidak terdapat alokasi Anggaran.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 49.555.000,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 49.555.000,- dan Rp. 0,-. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II karena tidak terdapat alokasi anggaran.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026 dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2026	2025	Naik (Turun) %
Notebook	-	-	(N/A)
Scannner	-	-	(N/A)
Air Conditioner (AC)	22.500.000	-	(N/A)
PC	-	-	(N/A)
Laptop	11.707.000	-	(N/A)
Printer	8.040.000	-	(N/A)
Meja	4.008.000	-	(N/A)
Kursi	3.300.000	-	(N/A)
Jumlah Belanja Kotor	49.555.000	-	(N/A)
Pengembalian Belanja	-	-	(N/A)
Jumlah Belanja Bersih	49.555.000	-	**(N/A)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Reaalisai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 September 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan, karena tidak terdapat alokasi anggaran pada DIPA.

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Reaalisai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 September 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan, karena tidak terdapat alokasi anggaran pada DIPA.

Tabel 11

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA. 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp. 0,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 September 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan, karena tidak terdapat alokasi anggaran pada DIPA.

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp 15.410.000,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.410.000,- dan Rp. 1.746.000,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II per 30 September 2026 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10

Rincian Aset Lancar per 30 September 2026 dan 2025

No.	Aset Lancar	30-Sep-26	2025
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 15.000.000	Rp -
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
5	Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp -
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp 410.000	Rp 1.746.000
	Jumlah	**Rp 15.410.000**	**Rp 1.746.000**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 15.000.000,-.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Per 31 Desember 2025, seluruh sisa UP sudah disetorkan ke rekening Kas Negara sehingga saat tanggal Neraca, sudah tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai beriikut :

Tabel 10

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 September 2026 dan 2025

Keterangan	30 September 2026	31 Desember 2025
Rekening Mandiri	-	-
di Brankas	15.000.000	-
Jumlah	15.000.000	-

Saldo Kas dibendahara pengeluaran 30 September 2026 sebesar Rp. 15.000.000,- di brankas bendahara, sementara saldo kas bendahara pengeluaran 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari kas di rekening mandiri sebesar Rp. 0,- dan di brankas bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,-.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar masing-masing Rp 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0,-.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Belanja Dibayar di Muka Rp 0,-.

C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Piutang Bukan Pajak Rp 0,-.

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp 0,-.

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp 0,-. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur.

Bag Lancar TGR Rp 0,-.

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp 0,-.

C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp 0,-. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Persediaan
Rp .410.000,-.

C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 410.000,- dan Rp. 0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2026 dan 2025 tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11

Rincian Persediaan

No.	Persediaan	31 SEP 2026		2025	
1	Barang Konsumsi	Rp	410.000	Rp	1.746.000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp	-	Rp	-
3	Suka Cadang	Rp	-	Rp	-
4	Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	Rp	-	Rp	-
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	Rp	-	Rp	-
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp	-	Rp	-
7	Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp	-	Rp	-
	Jumlah	**Rp**	**410.000**	**Rp**	**1.746.000**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari Alat Tulis, Buku Tulis, Ordner, MAP. Alat Perekat, Kertas HVS dan Amplop

Aset Tetap
Rp. 7.024.888.221,-

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 September 2026 dan 2025 tersaji sebesar Rp. 7.024.888.221,- dan Rp. 7.141.975.200,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II per 30 September 2026 dan 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12

Rincian Aset Tetap

No.	Jenis	30 Juni 2026	2025
1	Tanah	Rp 3.460.550.000	Rp 3.460.550.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 2.761.900.796	Rp 2.804.189.486
3	Gedung dan Bangunan	Rp 4.478.333.149	Rp 4.478.333.149
4	Jalan, Irigasi	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 27.744.000	Rp 27.744.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
7	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	Rp -	Rp -
	Jumlah	**Rp 10.728.527.945**	**Rp 10.770.816.635**
	Akumulasi Penyusutan	Rp (3.703.639.724)	Rp (3.628.841.435)
	Nilai Buku Aset Tetap	**Rp 7.024.888.221**	**Rp 7.141.975.200**

Tanah Rp 3.460.550.000,-

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II per 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp 3.460.550.000,- dan Rp 3.460.550.000,-.

Peralatan dan Mesin Rp 2.761.900.796,-.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2026 dan 2025 adalah Rp. 2.761.900.796,- dan Rp. 2.804.189.486,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 13

Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 1 Januari 2026	Rp	2.804.189.486
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklarifikasi	Rp	-
Mutasi Kurang :		
Penghentian Aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 September 2026	Rp	2.761.900.796
Akumulasi Penyusutan s/d 30 September 2026	Rp	(2.594.495.834)
Nilai Buku per 30 September 2026	Rp	167.404.962

Gedung dan Bangunan Rp . 4.478.333.149,-.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 30 September 2026 dan 2025 adalah Rp. 4.478.333.149,-. dan 4.478.333.149,- Mutasi transaksi terhadap gedung dan bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2026		**4.478.333.149**
Mutasi tambah:		
Pengembangan Nilai Aset		-
Koreksi Kesalahan input IP		-
		-
		-
Mutasi Kurang:		
		-
		-
		-
		-
Saldo per 30 September 2026		**4.478.333.149**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2026	Rp	(1.109.143.890)
Nilai Buku per 30 September 2026		**3.369.189.259**

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,-.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-. Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya Rp. 27.744.000,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2026 dan 2025 adalah Rp. 27.744.000,- dan 27.744.000,-. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 0,-.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2026 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-. Tidak ada transaksi pada Konstruksi dalam Pengerjaan.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp. 0,-.

C.2.7 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Peralatan dan Mesin Belum Diregister adalah peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya dibawah Rp. 1.000.000,- sehingga pencatatannya pada Aplikasi SIMAK-BMN mengalami kendala yang menyebabkan terbacanya sebagai belum diregister.

Tidak ada transaksi pada Peralatan dan Mesin Belum Diregister.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.(3,703,639,724,-).

C.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2026 dan 2024 adalah masing-masing Rp. (*3,703,639,724,*-) dan Rp. (3,628,841,435,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2026 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 2.761.900.796	Rp (2.594.495.834)	Rp 167.404.962
2	Gedung dan Bangunan	Rp 4.478.333.149	Rp (1.109.143.890)	Rp 3.369.189.259
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 27.744.000	Rp -	Rp 27.744.000
Akumulasi Penyusutan		Rp 7.267.977.945	Rp (3.703.639.724)	Rp 3.564.338.221

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tuntutan Perbendaharaan Rp. 0,-.

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Penyisihan Piutang tak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan Rp. 0,-.

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Aset Lainnya Rp. 162.130.147,-

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 30 September 2026 dan 2025 adalah Rp. 162.130.147,- dan Rp. 192.051.956,-. Aset Lainnya merupakan aset

yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II adalah berupa software dan aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15

Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	30 SEP 2026	2025
1	Aset Tak Berwujud	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000
2	Aset Lain-lain	Rp 726.422.582	Rp 634.578.892
3	**Jumlah**	**Rp 946.422.582**	**Rp 854.578.892**
	Akumulasi Penyusutan	Rp (784.292.435)	Rp (662.526.936)
	Nilai Buku Aset Lainnya	**Rp 162.130.147**	**Rp 192.051.956**

Aset Tak Berwujud Rp. 220.000.000,-.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp. 220.000.000,- dan Rp 220.000.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Dalam hal ini aset tersebut berupa dalam bentuk software yaitu Software *Building Information Modelling* (BIM).

Aset Lain-lain Rp. 726.422.582,-.

C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing adalah Rp. 726.422.582,- dan Rp. 634.578.892,-.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional dan dihentikan dari penggunaannya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset tersebut adalah *magnetic particle* dan *volume metric flash*.

Akumulasi Penyusutan Lainnya Rp. (784.292.435),-

C.4.3. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp. (784.229.435,-) dan Rp. (662.526.936),-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2026 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp 220.000.000	Rp 192.500.000	Rp 27.500.000
2	Aset Lain-lain	Rp 726.422.582	Rp (564.292.435)	Rp 162.130.147
Akumulasi Penyusutan		**Rp 946.422.582**	**Rp (371.792.435)**	**Rp 189.630.147**

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Rp 15.000.000,-.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2026 dan 2025 tersaji masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 0,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 0.

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 0,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Uang Muka dari KPPN Rp. 15.000.000,-.

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 15.000.000,-. Dan Rp. 0,-

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp. 0,-.

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 September 2026 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0,-.

C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2026 dan 2025 sebesar masing-masing Rp. 0,-.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp. 0,-.

C.5.5 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2026 dan 2025 sebesar masing-masing Rp. 0,-.

Ekuitas Rp. 7,187,428,368,-.

EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 7,187,428,368,- dan Rp. 7,335,773,156,- Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP Rp. 0,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 17

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	-
Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	-
JUMLAH PNBP	**0**	**0**	-

Beban Pegawai Rp. 0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 18

Rincian Beban Pegawai 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	30 SEP 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	-
Beban Honorarium	0	0	-
Beban Lembur	0	0	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	0	-
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	**0**	**0**	-

Beban Persediaan Rp. 53,301,100,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 53,301,100,- dan Rp. 0,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 19

Rincian Beban Persediaan 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEPTEMBER 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	53.301.100	-	(N/A)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	(N/A)
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	**53.301.100**	**0**	(N/A)

Beban Barang dan Jasa Rp. 406,467,373,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 406,467,373,- dan Rp. 234,319,946,-.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEP 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340.500	0	(N/A)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	(N/A)
Beban Jasa Profesi	0	0	(N/A)
Beban Jasa Lainnya	0	0	(N/A)
Beban Barang Operasional Lainnya	97.579.675	43.562.000	124
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32.560.000	19.960.000	63,13
Beban Sewa	0	0	(N/A)
Beban Bahan	6.263.684	7.643.500	(18,05)
Beban Langganan Air	6.092.385	1.640.440	271,39
Beban Langganan Listrik	69.849.610	24.415.652	186,09
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	(N/A)
Beban Langganan Telepon	1.414.984	370.589	281,82
Beban Jasa Konsultan	0	0	(N/A)
Beban Keperluan Perkantoran	135.187.000	120.388.925	12,29
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	(N/A)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	57.179.535	16.338.840	249,96
Beban Barang Non-Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	(N/A)
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA	**406.467.373**	**234.319.946**	**42,35**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp. 126.647.023,-

Beban Pemeliharaan 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 126.647.023,- dan Rp. 143.229.645,-.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 30 September 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 21

Rincian Beban Pemeliharaan 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEP 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.050.000	120.150.024	(64,17)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.624.023	23.079.621	262,33
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	**126.674.023**	**143.229.645**	**(13,07)**

Beban Perjalanan Dinas Rp. 21,934,603.,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.934.603,- dan Rp. 0,-.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 30 September 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 22

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEP 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	21.934.603	0	(N/A)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	(N/A)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	(N/A)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	(N/A)
Jumlah	**21.934.603**	**0**	**(N/A)**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019.

Beban Bantuan Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerin-tah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 194,244,244,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 194,244,244,- dan Rp. 0,-.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 0,- merupakan penyusutaan nilai aset tetap seperti aset tanah, bangunan, kendaraan, atau peralatan dan aset tak berwujud pada Triwulan III Tahun 2026.

Tabel 23

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEP 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	92.318.399	0	(N/A)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72.004.036	0	(N/A)
Beban Amortisasi Software	27.500.000	0	(N/A)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	2.421.809	0	(N/A)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI	**194.244.244**	**0**	**(N/A)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Beban Lain-lain Rp. 0,-

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 September 2026 dan 2025 adalah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berupa lelang kendaraan dinas yang tidak digunakan lagi. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 22

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 September 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEP 2026	2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**0**	**0**	**-**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0**	**0**	**-**
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0**	**0**	**-**

Pos Luar Biasa Rp. 0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Triwulan III 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2026	REALISASI T.A. 2025	Naik (turun)	%
Pendapatan PNBP	-	-	(N/A)	
Beban Perjalanan Dinas	-	-	(N/A)	
Beban Persediaan	-	-	(N/A)	
-	-	-	(N/A)	
-	-	-	(N/A)	
Jumlah	**-**	**-**	**(N/A)**	

Pendapatan PNBP diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor. Sedangkan beban perjalanan dinas dan beban persediaan merupakan beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 7.335.773.156,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.335.773.156,- dan Rp. 0,-.

Defisit LO Rp. (802,621,343,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. (802,621,343,-) dan Rp. (383,803,591,-). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuain Nilai Aset Rp.0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijkan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Tabel 25

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

JENIS PERSEDIAAN	KOREKSI
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
JUMLAH	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.(0,-)

E.3.4 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. (0,-) dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal

dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi di BP3KP Sumatera II TA 2026 berasal dari bertambahnya masa manfaat peralatan dan mesin.

Tabel 26

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2026

JENIS ASET TETAP	NILAI KOREKSI
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
JUMLAH	0

Koreksi Lain-Lain Rp. 0,-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp. 656,596,099,-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 656,596,099,- dan Rp. 383,872,591,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 27

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan ke Entitas Lain	656.596.099
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah	0
JUMLAH	**656.596.099**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2026, ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp. 656,596,099,- sedangkan Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp. 0,-.

Ekuitas Akhir
Rp.7.187.428.368,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.187.428.368,- dan Rp. 60.000,-.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
Jalan Suluh No. 99 A Kel. Sidorejo Hilir Medan – 20222 Telepon/Faks (061) 80033120

SURAT KETERANGAN

Nomor: 07/KT/Bp2/2026

Berdasarkan surat *Sekretaris Jenderal Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: KU0503/Sj/813/T/2026 Tanggal 07 Agustus 2026* dengan hal instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, terdapat Ketidaksesuaian pencatatan antara belanja ekstrakomptabel (di bawah nilai minimum kapitalisasi) yang dianggarkan dan dicatat sebagai intrakomptabel (memenuhi kapitalisasi aset di neraca), kesalahan penggunaan kode akun belanja, ketidaksesuaian antara kode akun dan kode barang yang berdampak pada validitas Laporan Keuangan. Bersama ini disampaikan dengan sebenarnya mengenai permasalahan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh pada tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1 Kronologi Permasalahan :

a. Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II melakukan pangadaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Meja Kerja Besi, dan Kursi Besi/Metal dengan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit.

b. Berdasarkan arahan dan struktur pengganggaran dari Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada TA 2025, Satuan Kerja tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532111). Namun pada Tahun 2025 BP3KP Sumatera II mendapatkan tambahan pegawai yaitu CPNS yang ditempatkan di BP3KP Sumatera II, sehingga dibutuhkan penambahan jumlah fasilitas kantor untuk kebutuhan pegawai baru tersebut. Oleh karena itu, BP3KP Sumatera II melakukan pengadaan pembelian barang menggunakan akun belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel pada kegiatan operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan niat awal dicatatkan sebagai Listing Aset BMN Ekstrakompatabel.

c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK no. 181/PMK.06/2016 tentang yang mengatur batasan nilai barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), kriteria belanja barang Ekstrakompatabel yang nilai porelahannya berada dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan nilai perolehan belanja barang tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sistem pada modul Aset Tetap aplikasi SAKTI secara otomatis (by system) mengklasifikasikan dan mengunci transaksi tersebut ke dalam kelompok aset intrakompatabel (masuk dalam Neraca)

2 Dampak Permasalahan :

a. Terjadi ketidaksesuaian data (mismatch) antara pos anggaran pengeluaran dengan neraca aset, di mana barang tercatat sebagai aset, barang tercatat sebagai aset intrakomptabel namun tidak didukung oleh realisasi Kode Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kode Akun 532111)
b. Karena nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dikunci oleh sistem ke dalam kelompok Intrakomptabel, Satuan Kerja BP3KP Sumatera II tidak dapat melakukan perbaikan atau perubahan data input melalui menu Perolehan Lainnya secara regular pada aplikasi SAKTI.
c. Hal tersebut di atas mengakibatkan transaksi ini terus terbaca sebagai “Kesalahan Pencatatan Akun Lain” dan secara permanen muncul sebagai To Do List (daftar wajib tindak lanjut) pada modul Aset Tetap / Modul Komitmen SAKTI yang mengganggu kelancaran validasi laporan keuangan.

3 Tindak Lanjut Permasalahan :

a. Satuan Kerja telah melakukan alur konsultasi dan eskalasi berjenjang guna menyelesaikan permasalahan To Do List tersebut dengan KPPN Medan I bersama Sekretariat Jenderal, Dimana pihak KPPN Medan I memberikan saran teknis awal agar Satuan Kerja BP3KP Sumatera II mengubah penggunaan akun belanja

oprasional/ekstrakomptabel menjadi kelompok Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111).

b. Menindaklanjuti arahan KPPN Medan I, Satuan Kerja BP3KP Sumatera II melakukan konsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan analisis ketentuan pembendaharaan, Satuan Kerja secara regulasi tidak dibenarkan memunculkan /menggunakan Akun Belanja Modal tanpa adanya usulan baku, persetujuan, serta alokasi revisi anggaran resmi dari Unit Eselon I Kementerian PKP, yang mana pada TA. 2025 kebijakan Eselon I memang tidak menganggarkan alokasi belanja modal untuk Satker Unit Kerja Balai.
c. Mengingat batasan regulasi penganggaran di tingkat Eselon I serta batasan rule validasi nilai nominal pada sistem SAKTI, disimpulkan bahwa To Do List kesalahan pencatatan ini secara teknis aplikasi akan tetap terus muncul dan tidak dapat dihilangkan/dihapus.
d. Sebagai mitigasi Risiko, Satuan Kerja BP3KP Sumatera II telah mengambil langkah penyelesaian dengan menyajikan secara transparan dan detail kronologi kendala ini di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta Laporan BMN pada setiap periode pelaporan.

4 Rincian Barang : Daftar Barang Terlampir

Surat Keterangan ini diterbitkan sebagai dokumen pendukung resmi yang dilampirkan untuk memberikan justifikasi hukum/administrasi yang sah atas keberadaan To Do List tersebut di hadapan Auditor Internal Inspektorat Jenderal Kementerian PKP maupun Eksternal (BPK RI).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunankan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi penatausahaan BMN.

Medan, 18 Agustus 2026

Kuasa Pengguna Barang
Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II



Ir. Wanyu Adi Satriawan, S.T., M.T.
NIP. 198105122010121001

Lampiran I Surat Keterangan
Nomor : 07/KT/Bp2/2026
Tanggal : 18 Agustus 2026

PENCATATAN EKSTRAKOMPTABEL MENJADI INTRAKOMPTABEL PADA APLIKASI SAKTI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	172 s.d. 191	5 Desember 2025	Rp.20.000.000,-	Baik
2	3.05.02.01.001	Meja Besi	16. s.d. 35	5 Desember 2025	Rp.20.000.000,-	Baik
Total					**Rp. 40.000.000,-**	

Medan, 18 Agustus 2026

Kuasa Pengguna Barang
Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.
NIP. 198105122010121001

Lampiran II Surat Keterangan
Nomor : 07/KT/Bp2/2026
Tanggal : 18 Agustus 2026

No.	Kode Barang	Nama Barang	N.U.P	Foto Dokumentasi
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	172 s.d. 191	
2	3.05.02.01.001	Meja Besi	16. s.d. 35	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 146

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II 691381

Tgl Data : 18/10/26 10:01 PM

Tgl Cetak : 18/10/26 10:45 PM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,334,246,000	656,596,099	(677,649,901)	49	965,241,000	383,872,591	581,368,409	40
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,284,398,000	607,041,099	(677,356,901)	47	965,241,000	383,872,591	581,368,409	40
3. Belanja Modal	49,848,000	49,555,000	(293,000)	99	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 146

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II 691381

Tgl Data : 18/10/26 10:01 PM

Tgl Cetak : 18/10/26 10:45 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**1,334,246,000**	**656,596,099**	**(677,649,901)**	**49**	**965,241,000**	**383,872,591**	**581,368,409**	**40**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

MEDAN, 18 Oktober 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T, M.T.

NIP 198105122010121001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (691381) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

Tgl Data : 18/10/26 10:01 PM

Tgl Cetak : 18/10/26 10:45 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0	15,000,000	0.00
Persediaan	410,000	1,746,000	(1,336,000)	(76.52)
JUMLAH ASET LANCAR	**15,410,000**	**1,746,000**	**13,664,000**	**782.59**
ASET TETAP				
Tanah	3,460,550,000	3,460,550,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,761,900,796	2,804,189,486	(42,288,690)	(1.51)
Gedung dan Bangunan	4,478,333,149	4,478,333,149	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,744,000	27,744,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,703,639,724)	(3,628,841,435)	(74,798,289)	2.06
JUMLAH ASET TETAP	**7,024,888,221**	**7,141,975,200**	**(117,086,979)**	**(1.64)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	220,000,000	220,000,000	0	0.00
Aset Lain-lain	726,422,582	634,578,892	91,843,690	14.47
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(784,292,435)	(662,526,936)	(121,765,499)	18.38
JUMLAH ASET LAINNYA	**162,130,147**	**192,051,956**	**(29,921,809)**	**(15.58)**
JUMLAH ASET	**7,202,428,368**	**7,335,773,156**	**(133,344,788)**	**(1.82)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**15,000,000**	**0**	**15,000,000**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**15,000,000**	**0**	**15,000,000**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,187,428,368	7,335,773,156	(148,344,788)	(2.02)
JUMLAH EKUITAS	**7,187,428,368**	**7,335,773,156**	**(148,344,788)**	**(2.02)**
JUMLAH EKUITAS	**7,187,428,368**	**7,335,773,156**	**(148,344,788)**	**(2.02)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7,202,428,368**	**7,335,773,156**	**(133,344,788)**	**(1.82)**

Keterangan :

FINAL

MEDAN, 18 Oktober 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T, M.T.

NIP 198105122010121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (691381) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

Tgl Data : 18/10/26 10:01 PM

Tgl Cetak : 18/10/26 10:46 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	410,000	0
0.0	131111	Tanah	3,460,550,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,761,900,796	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,478,333,149	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	27,744,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,594,495,834
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,109,143,890
0.0	162151	Software	220,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	726,422,582	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	564,292,435
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	220,000,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	15,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	656,596,099
0.0	391111	Ekuitas	0	7,335,773,156
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,319,544	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	135,187,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32,560,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	97,579,675	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,263,684	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	69,849,610	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,414,984	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,092,385	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	57,179,535	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,050,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,624,023	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21,934,603	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	92,318,399	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72,004,036	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	27,500,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,421,809	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	53,301,100	0
JUMLAH			**12,495,301,414**	**12,495,301,414**

Keterangan :

FINAL

MEDAN, 18 Oktober 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T, M.T.

NIP. 198105122010121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (691381) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

Tgl Data : 18/10/26 9:38 PM

Tgl Cetak : 18/10/26 10:46 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	656,596,099
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	135,187,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32,560,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	97,579,675	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,263,684	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51,965,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	69,849,610	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,414,984	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,092,385	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	57,179,535	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,050,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,624,023	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,934,603	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,555,000	0
JUMLAH			**656,596,099**	**656,596,099**

Keterangan :

FINAL

MEDAN, 18 Oktober 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T, M.T.

198105122010121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

UNIT ORGANISASI : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0700) SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : **(691381) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II**

Tgl Data : 18/10/26 9:38 PM

Tgl Cetak : 18/10/26 10:44 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,335,773,156	0	7,335,773,156	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(802,621,343)	(383,803,591)	(418,817,752)	109.12
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,319,544)	0	(2,319,544)	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,319,544)	0	(2,319,544)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	656,596,099	383,872,591	272,723,508	71.05
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(148,344,788)	69,000	(148,413,788)	(215,092.45)
EKUITAS AKHIR	7,187,428,368	69,000	7,187,359,368	10,416,462.85

Keterangan :

FINAL

MEDAN, 18 Oktober 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Wahyu Adi Satriawan, S.T, M.T.

NIP. 198105122010121001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ESELON I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0700) SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : **(691381) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II**

Tgl Data : 18/10/26 7:06 PM
Tgl Cetak : 18/10/26 10:44 PM
Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	53,301,100	6,254,000	47,047,100	752.272
Beban Barang dan Jasa	406,467,373	234,319,946	172,147,427	73.467
Beban Pemeliharaan	126,674,023	143,229,645	(16,555,622)	(11.559)
Beban Perjalanan Dinas	21,934,603	0	21,934,603	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ESELON I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(0700) SUMATERA UTARA**

SATUAN KERJA : **(691381) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II**

Tgl Data : 18/10/26 7:06 PM
Tgl Cetak : 18/10/26 10:44 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	194,244,244	0	194,244,244	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	802,621,343	383,803,591	418,817,752	109.123
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(802,621,343)	(383,803,591)	(418,817,752)	109.123
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(802,621,343)	(383,803,591)	(418,817,752)	109.123
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(802,621,343)	(383,803,591)	(418,817,752)	109.123

Keterangan :

FINAL

MEDAN, 18 Oktober 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Wahyu Adi Satriawan, S.T, M.T.

NIP. 198105122010121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 146**	**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 691381**	**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/10/26 5:40 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/10/26 4:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	210,212,000	216,368,000	135,187,000	0	135,187,000	62.48	81,181,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,932,000	2,500,000	340,500	0	340,500	13.62	2,159,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	67,680,000	56,880,000	32,560,000	0	32,560,000	57.24	24,320,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	171,428,000	192,651,000	97,579,675	0	97,579,675	50.65	95,071,325
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	458,252,000	468,399,000	265,667,175	0	265,667,175	56.72	202,731,825
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	15,337,000	15,337,000	6,263,684	0	6,263,684	40.84	9,073,316
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15,337,000	15,337,000	6,263,684	0	6,263,684	40.84	9,073,316
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52,000,000	108,000,000	51,965,100	0	51,965,100	48.12	56,034,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	52,000,000	108,000,000	51,965,100	0	51,965,100	48.12	56,034,900
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	108,000,000	150,000,000	69,849,610	0	69,849,610	46.57	80,150,390
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	4,200,000	1,414,984	0	1,414,984	33.69	2,785,016
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	12,000,000	6,092,385	0	6,092,385	50.77	5,907,615
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	108,000,000	81,954,000	57,179,535	0	57,179,535	69.77	24,774,465
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	240,000,000	248,154,000	134,536,514	0	134,536,514	54.21	113,617,486
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270,572,000	270,572,000	43,050,000	0	43,050,000	15.91	227,522,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,430,000	145,620,000	83,624,023	0	83,624,023	57.43	61,995,977
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	409,002,000	416,192,000	126,674,023	0	126,674,023	30.44	289,517,977
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,248,000	22,016,000	21,934,603	0	21,934,603	99.63	81,397
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	60,248,000	28,316,000	21,934,603	0	21,934,603	77.46	6,381,397
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,234,839,000	1,284,398,000	607,041,099	0	607,041,099	47.26	677,356,901
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69,234,000	49,848,000	49,555,000	0	49,555,000	99.41	293,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	69,234,000	49,848,000	49,555,000	0	49,555,000	99.41	293,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	69,234,000	49,848,000	49,555,000	0	49,555,000	99.41	293,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 146**	**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0700**	**SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA	**: 691381**	**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II**
JENIS SATUAN KERJA	**: KP**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/10/26 5:40 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/10/26 4:15 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	1,304,073,000	1,334,246,000	656,596,099	0	656,596,099	49.21	677,649,901

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 691489 - BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-07

Tgl Cetak : 20/10/26 1:25
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	255,786,000	255,786,000	0
2	Belanja	205,136,795	205,136,795	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Agustus 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 691489 - BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-08

Tgl Cetak : 20/10/26 1:26
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	255,786,000	255,786,000	0
2	Belanja	211,116,795	211,116,795	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 September 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KPPN MEDAN I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 691489 - BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-09

Tgl Cetak : 20/10/26 1:26
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	255,786,000	255,786,000	0
2	Belanja	216,836,795	216,836,795	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	6,000,000	6,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	6,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Oktober 2026